



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B

Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan

Kode Pos 67153 Tlp & Fax (0343) 741012

Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NO. DOKUMEN	:	W14.U21/03/SOP/11/2016
REVISI KE	:	3
TANGGAL TERBIT	:	5 Oktober 2017

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

SOP BIAYA PROSES

DISIAPKAN OLEH	:	DIYANTO WARDOYO, SH NIP. 19640204 198602 1 002
DIPERIKSA OLEH	:	ASWIN ARIEF, SH.,MH. NIP. 198003022003121001
DISAHKAN OLEH	:	Dr. GUTIARSO, SH.,MH. NIP. 19660508 1999212 1 001



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B

Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan
Kode Pos 67153 Tlp & Fax (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor S.O.P	W14.U21/03/SOP/11/2016
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	5 Oktober 2017
Tanggal Efektif	6 Oktober 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P BIAYA PROSES

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Panjar Biaya Perkara.2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan dibawahnya.3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	Kualifikasi Pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none">1. S2 HUKUM2. S1 HUKUM3. SLTA
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. S.O.P Kepaniteraan Perdata2. S.O.P Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Perkara	Peralatan / Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Laptop / Komputer2. Printer3. Alat Tulis Kantor4. Buku Register5. Buku Jurnal Keuangan
Peringatan : <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses perkaratidakberjalan lancar</p>	Pencatatan / Pendataan <ul style="list-style-type: none">▪ Sistem Informasi Penelusuran Perkara▪ Buku Biaya Proses▪ Buku Bantu

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kasir	Bendara	Pelaksana	PPK	Panitera	Persyaratan / perlengkapan	Waktu	Output	ket
1	Menyerahkan biaya proses pada bendahara						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait	30 mnt	SKUM dan bukti setoran dari bank	
2	Membukukan biaya proses perkara						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait t	1 x 24 jam	Tercat nya biaya proses perkara	
3	Merencanakan kebutuhan ATK						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait	1x 24 jam	Biaya proses terencana	
4	Persetujuan belanja ATK						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait	1 x 24 jam	Disetujui belanja ATK	
5	Melakukan pembelian ATK sesuai persetujuan PPK						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait	120 mnt	Pembelian ATK	
6	Mencatat pengeluaran Biaya proses perkara						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait	60 mnt	Tercat nya pengeluaran	
7	Melakukan penutupan bukubiaya proses keuangan						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait	1 x24 jam	Tertib adminitrasi buku biaya proses	
8	Menandatangani penutupan buku 'biaya proses keuangan perkara , baik penutupan rutin(bulanan) danisidentil						PC,kertas,buku,keuangan,biaya,proses perkara ,alattulis, stempel, danreferensiterkait	10 mnt	Tertib adminitrasi buku biaya proses keuangan perkara	

HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL. MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1	Lembar pengesahan tidak ada	Pengesahan pada setiap nomor SOP dan lembar tersendiri	22 September 2016
2	Penomoran belum menggunakan Kode PMPN	Penomoran menggunakan Kode PMPN	22 September 2016
3	Dasar Hukum menggunakan undang-undang dan peraturan yang lama	Dasar Hukum sudah menggunakan undang-undang dan peraturan terbaru	22 September 2016